

GOVERNANCE DAN CAPACITY BUILDING DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI INDONESIA

Mochamad Chazienul Ulum

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya(B2P3KS) Yogyakarta,

Jl. Mayjen Haryono 163. Malang 65145

E-mail: ulum.moch@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia is a vulnerable developing country due to natural disasters, particularly floods. These disasters hit Indonesia commonly during the rainy season. It resulted in adverse effects on human life, economy and environment. The purpose of this paper is to examine the relationship between empirical and theoretical studies on flood management in the perspective of governance and capacity building. The research method that used is the study of literatures and the Focus Group Discussion (FGD). The research site is flood-prone areas, which is 4 (four) regencies in East Java Province, Indonesia. All of them have a high flood-prone index. In conclusion, sustainable flood management requires a multi-stakeholder involvement and participation of communities simultaneously. Flood management should be done with a systematic approach, and synergy of the various parties in efforts to cope with the disaster. Therefore, strengthening the sense of crisis, commitment, role and collective responsibility, and continuity of cooperation / collaboration in the context of governance network and capacity building is needed to maintain the sustainability of effective flood management..

Keywords: *Governance, capacity, disaster, flood*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan / atau lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana.

Kawasan Asia berada di urutan teratas dari daftar korban akibat bencana alam. Hampir setengah bencana di dunia terjadi di Asia membuat wilayah ini rawan bencana. Laporan dari ESCAP juga merinci daftar negara di kawasan Asia Pasifik mengalami bencana alam selama periode 1980-2009.

Sebagai contoh, Indonesia menempati peringkat kedua dalam daftar jumlah kematian

tertinggi akibat bencana alam di Asia-Pasifik. Selama 20 tahun terakhir, berbagai bencana alam di negara ini juga telah menyebabkan kerugian ekonomi paling sedikit US \$ 22,5 miliar. Data ini terdapat dalam *The Asia Pacific Disaster Report 2010* yang disusun oleh *The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)* dan *The UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)*. Ini adalah pertama kalinya PBB menyiapkan laporan khusus tentang bencana alam di kawasan Asia-Pasifik yang dipublikasikan pada 26 Oktober 2010.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang rentan akibat berbagai bencana alam, terutama banjir. Banjir sudah biasa melanda Indonesia, terutama pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan.

Banjir disebabkan oleh 2 (dua) kategori,

yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan, seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan permukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem kontrol banjir yang kurang/tidak tepat.

Risiko banjir tidak dapat dihindari sepenuhnya sehingga harus dikelola. Manajemen bencana banjir memang tidak berusaha untuk menghilangkan bahaya banjir tetapi untuk menanggulangnya. Risiko banjir tergantung pada komponen yang terdiri dari bahaya dan kerentanan. Kombinasi faktor alam dan manusia menciptakan risiko banjir. Keberhasilan manajemen risiko banjir diperoleh jika langkah-langkah struktural dan non-struktural dilaksanakan. Pencegahan dan mitigasi banjir mencakup tindakan pengendalian banjir secara struktural, seperti pembangunan bendungan atau tanggul sungai dan tindakan non-struktural seperti prediksi dan peringatan banjir, manajemen risiko banjir, partisipasi komunitas/ masyarakat, penataan institusional, dan sebagainya.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menelaah hubungan antara studi empiris dan teoritis tentang manajemen bencana banjir. Secara empiris, hal itu berkaitan dengan masalah banjir di Indonesia, khususnya beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan), dan secara teoritis terkait dengan penerapan dan pengembangan model *governance* dan *capacity building* dalam konteks manajemen bencana, khususnya banjir.

2. METODOLOGI

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah rawan banjir (*flood-prone area*), yaitu Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan. Adapun waktu penelitian berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 Agustus 2010.

2.2 Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Untuk studi literatur, beberapa sumber yang dapat digunakan, yaitu: 1) laporan hasil penelitian, 2) jurnal, 3) buku referensi.

1. Laporan hasil penelitian merupakan sumber referensi berharga. Dengan membaca laporan penelitian tentang manajemen bencana, kita akan mendapatkan deskripsi keseluruhan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan.
2. Jurnal yang berisi tulisan-tulisan dalam disiplin yang sama. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk digunakan sebagai sumber data sekunder. Peneliti juga dapat menggunakan tulisan di jurnal sebagai kutipan untuk bahan referensi dalam penelitian.
3. Buku referensi berisi teks yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Sebuah buku referensi dapat memuat sebuah artikel yang mendalam tentang topik tertentu dan disertai dengan teori-teori pendukung sehingga kita akan dapat mengetahui perkembangan (terakhir) ilmu/teori tersebut.

Selain studi literatur, peneliti juga melakukan FGD yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap makna yang sesuai dengan pemahaman sebuah kelompok berdasarkan hasil diskusi yang berpusat pada isu tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari interpretasi yang salah dari seorang peneliti untuk fokus pada masalah. FGD memungkinkan peneliti untuk memperoleh data lengkap dari

informan, dan juga memungkinkan fleksibilitas peneliti dalam menentukan desain pertanyaan, sehingga bebas meminta respons informan sesuai dengan tujuan penelitian.

Namun demikian, FGD juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

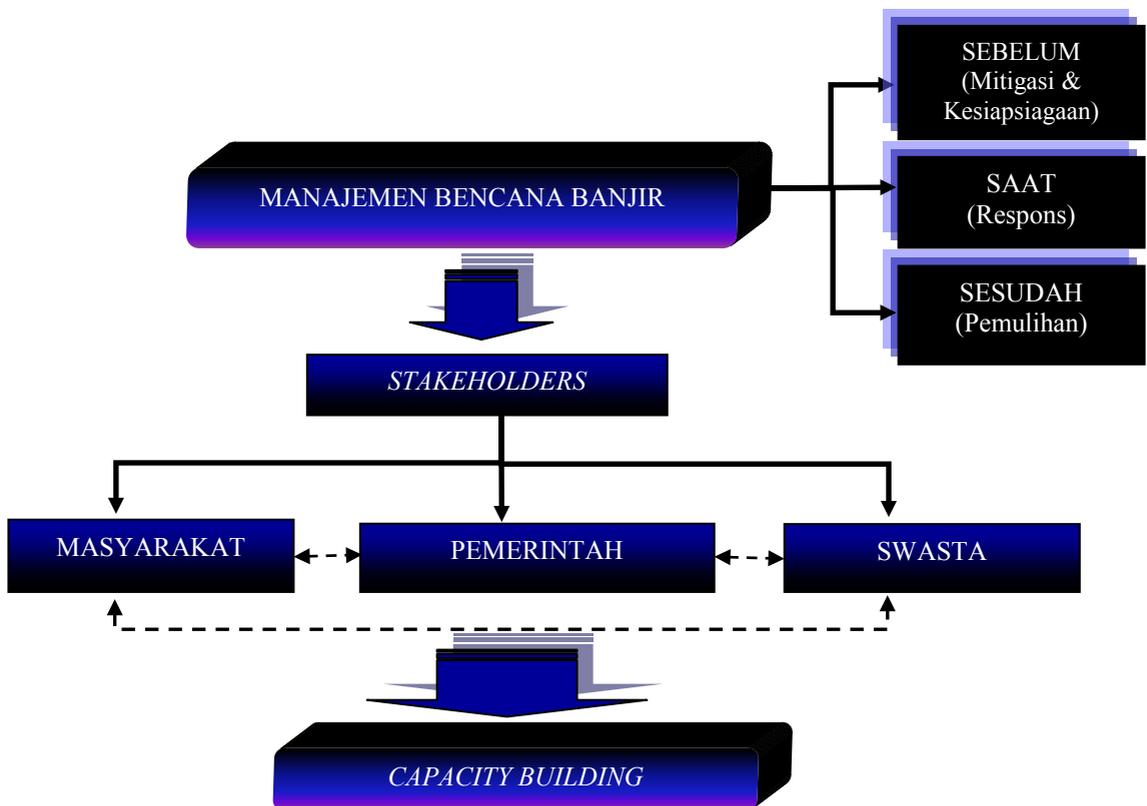
1. FGD tidak dapat digunakan untuk temuan umum dengan cakupan yang luas, sehingga membutuhkan studi yang lebih teliti dan rumit.
2. Dalam topik permasalahan yang sangat sensitif, anggota kelompok dapat ragu-ragu dalam mengekspresikan perasaan dan pengalamannya secara bebas di forum.

2.3 Kerangka Konseptual

Manajemen bencana banjir dalam tulisan ini mengacu pada studi yang terkait dengan penanggulangan bencana oleh Tun Lin Moe & Pairote Pathranarakul (2006, hal. 396-413). Berdasarkan waktu, peristiwa bencana dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian sebelum,

saat dan sesudah. Pada saat yang sama, ada 4 (empat) kegiatan, yaitu: mitigasi dan kesiapsiagaan (sebelum), respons (saat), dan pemulihan (setelah).

Selain itu, pemahaman tentang manajemen bencana banjir sebagai persoalan umum (*common issue*) memerlukan pemetaan struktur interaksi, keterlibatan, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam kontak langsung dengan akar penyebab dan korban bencana itu. Sebagai konsep *Governance* seperti dari Kooiman (1993) dan Pedroso (1999), para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mencakup unsur pemerintah, dan pelaku non-pemerintah, baik, swasta LSM, dan masyarakat. Tentu saja, berbagai peran dan tanggung jawab akan berbeda. Namun, pemerintah masih memiliki peran sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kepentingan utama (*principal stakeholder*). Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Selanjutnya, kapasitas komunitas untuk memelihara atau meningkatkan kualitas hidup dalam menghadapi gangguan eksternal tersebut dapat ditingkatkan, baik dengan mengurangi banjir atau dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menanggulangnya. Manajemen bencana banjir yang efektif berupaya untuk menemukan cara-cara koordinasi dan kerjasama melintasi batas-batas institusional untuk mencapai keputusan dan untuk melibatkan lembaga-lembaga di tingkat lokal, baik dalam keputusan maupun pelaksanaannya. Keberhasilan manajemen bencana banjir tergantung pada hubungan antar *stakeholders*, dan aturan yang dibuat dengan adil dan transparan untuk partisipasi *stakeholders*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Laporan Penelitian

Informasi Singkat Lokasi Penelitian di 4 (Empat) Kabupaten, Provinsi Jawa Timur

Peta Daerah Rawan Banjir



Sumber: <http://gis.pusair-pu.go.id/p2/>

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dialiri Sungai Bengawan Solo. Hal ini menyebabkan peluang tinggi untuk daerah ini banjir setiap tahun, khususnya di beberapa daerah utara Bojonegoro. Dengan *deforestasi* di dataran tinggi selatan Bojonegoro, kabupaten ini juga memiliki ancaman banjir bandang. Selanjutnya, Lamongan merupakan salah satu

kabupaten yang memiliki indeks rawan banjir pada tingkat tinggi di Jawa Timur. Ancaman lain dari bencana pada tingkat moderat adalah gempa, erosi, dan tsunami. Banjir tahunan di wilayah ini terjadi dari Sungai Bengawan Solo, situasi-kondisi yang sama seperti Bojonegoro.

Kabupaten Mojokerto juga merupakan daerah yang memiliki kategori indeks tinggi untuk banjir. Ancaman / bahaya ini terletak di daerah Selatan yang mengalir Sungai Brantas, salah satu sungai terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, di Kabupaten Pasuruan, jenis bencana yang sering terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Beberapa daerah di Pasuruan sebelah utara sering memiliki abrasi dan banjir dari air laut. Di sisi lain, di daerah pegunungan rawan terjadi banjir bandang yang disebabkan dari pembalakan liar.

Identifikasi Masalah Penanggulangan Bencana Banjir 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah membawa pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana dari hanya menanggapi situasi saat bencana terjadi (tanggap darurat) ke pencegahan dan pengurangan risiko bencana (PRB). Dengan perubahan ini, manajemen bencana merupakan kegiatan yang dimulai sejak bencana belum terjadi. Sebenarnya risiko banjir dapat dikurangi melalui program pengembangan perspektif PRB banjir dan penataan ruang berbasis pemetaan dan penilaian risiko bencana. Namun, berdasarkan hasil FGD, identifikasi masalah dalam konteks penanggulangan bencana banjir, antara lain:

1. Sebagian masyarakat lokal masih belum mengetahui eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk lebih intens terlibat / berpartisipasi dalam kegiatan untuk mengatasi bencana, terutama banjir.
2. Persepsi tentang bencana banjir, belum komprehensif dan umumnya masih dalam

perspektif tanggap darurat.

3. Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana belum memadai dan masih tergantung pada permintaan dana *On Call* kepada pemerintah pusat dalam situasi darurat.
4. Belum adanya keterlibatan sistemik dari organisasi masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi lintas sektor, termasuk sektor swasta dan universitas.

Rekomendasi Seputar Kebijakan Penanggulangan Bencana (Banjir)

Dari beberapa identifikasi masalah penanggulangan bencana banjir, maka rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, antara lain:

1. Secara umum Pemerintah Daerah dan DPRD di 4 (empat) kabupaten di Jawa Timur (Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto dan Pasuruan) perlu merumuskan dan menerapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana (PB). Regulasi tersebut akan memetakan peran dan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta). PB melalui pola kemitraan sangat dimungkinkan untuk lebih meringankan beban, termasuk beban anggaran (APBD) dari 4 (empat) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur tersebut.
2. Mengingat wilayah 4 (empat kabupaten di Jawa Timur (Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto dan Pasuruan) merupakan daerah rawan bencana, khususnya banjir, maka diperlukan perhatian yang lebih fokus pada periode pra-bencana sehingga diharapkan dapat menjadi investasi yang mampu mencegah meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan berbagai kerugian yang lain.
3. Dalam hal pembentukan suatu institusi (termasuk institusi yang terkait bencana), hendaknya daerah memiliki hak untuk menentukan bentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan/ kemampuan daerah. Besaran organisasi, apakah badan, kantor atau *capacity building* lembaga yang sudah ada harus mempertimbangkan

aspirasi daerah. Tingkat kerentanan dan karakteristik bencana yang berbeda antar-daerah dan masing-masing daerah memiliki masalah tersendiri yang harus diprioritaskan.

4. Kebijakan alokasi anggaran yang dibutuhkan hendaknya juga lebih diprioritaskan untuk keperluan pra bencana dalam kerangka manajemen bencana yang komprehensif (yang dimulai sejak dari pra hingga pasca bencana).
5. Penguatan kelembagaan di daerah terkait penanggulangan bencana merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Untuk itu, pemerintah (baik di tingkat pusat maupun provinsi) hendaknya terus melakukan advokasi dan mengupayakan program yang dapat mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di daerah.

3.2 Artikel Ulasan

Perspektif *Governance* untuk Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi berbagai aspek penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana. Siklus ini bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Lalu, mengapa *governance*? Kooiman (1993) mempertegas pentingnya *governance* dengan menyatakan:

Tidak ada satu pelaku, baik publik maupun privat mempunyai semua pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang kompleks, dinamis dan beragam; tidak ada pelaku yang mempunyai pandangan yang memadai untuk aplikasi suatu instrumen yang diperlukan secara efektif, tidak ada satu pelaku yang mempunyai cukup tindakan yang berpotensi untuk mendominasi secara *unilateral* dalam suatu model *governance*.

Governance akan terwujud hanya jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jaringan di antara elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jaringan telah menjadi fitur penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi publik atau swasta. Kebijakan publik tidak lagi proses eksklusif yang melibatkan aktor negara saja, tetapi merupakan produk *networking*, kerjasama, dan kemitraan di antara elemen *governance* (*policy network*). Manajemen bencana yang efektif membutuhkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan organisasi terkait.

Tindakan ramah lingkungan dan non destruktif tidak hanya harus menunjukkan sektor publik tetapi juga swasta. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa kegiatan bantuan bencana alam secara langsung, meskipun masih sebatas amal dan tidak berkelanjutan. Reformasi juga harus disusun dengan cara yang konstruktif pada ide-ide dan orientasi operasional yang telah didasarkan sepenuhnya pada keuntungan finansial tanpa perhatian yang seimbang dan memadai terhadap risiko sosial.

Komitmen dari sektor swasta perlu untuk ditingkatkan, seperti melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau kegiatan sosial yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia, pelaksanaan CSR sampai sekarang jelas masih jauh dari yang diharapkan. Persoalannya adalah persepsi dari sebagian besar korporasi yang menganggap bahwa alokasi dana untuk CSR sebagai beban karena merupakan faktor biaya. Selain itu, mereka sudah merasa cukup bertanggung jawab untuk membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk pembangunan. Persepsi tentang manajemen bencana sebagai *common issue*, kiranya membawa pada konsepsi ideal jaringan interaksional antar berbagai aktor. Wijaya (2007) menyatakan bahwa upaya manajemen bencana perlu direncanakan dalam koridor visi dan misi tertentu yang melibatkan ketiga sektor; pemerintah, swasta dan masyarakat. Tentunya ragam peran dan tanggung jawabnya akan berbeda. *Sharing* tanggung jawab antara ketiga sektor tersebut memerlukan transparansi dan

akuntabilitas untuk membangun kepercayaan di antara ketiganya yang akan berfungsi sebagai lem pengikat kinerja di antara mereka dalam upaya manajemen bencana. Tanggung jawab sosial sektor privat harus dipertegas, hak-hak sosial masyarakat perlu dijamin dan peran regulasi pemerintah perlu diperkuat.

Hal ini berdasarkan pada urgensi perspektif dan nilai-nilai *governance* dalam upaya manajemen bencana. Keterlibatan sinergis dalam bentuk jaringan (*network*) dari ketiga pilar *governance* menjadi titik tekan utamanya. Dengan *governance*, nilai dan praktik administrasi publik tidak lagi didominasi oleh sektor pemerintah. Adanya persyaratan dan garansi bagi terciptanya jaringan sinergis tersebut sekaligus merefleksikan suatu relasi multiaktor yang demokratis.

Capacity Building dalam Manajemen Bencana di Indonesia

Minimnya kemampuan antisipasi bencana di Indonesia diungkap oleh Wijaya (2007) bahwa yang menjadi masalah tidak hanya bencana dan beberapa penyebabnya, melainkan antisipasi bencana itu juga menjadi sebuah masalah tersendiri. Sebagai misal, sistem peringatan dini memerlukan struktur yang jelas, institusi yang fleksibel dan sigap, serta sosialisasi yang dapat menyentuh ke seluruh lapisan sosial. Tujuannya, membangun sebuah masyarakat yang selalu waspada menghadapi bencana sebagai konsekuensi dari kondisi hidup di daerah rawan bencana (*disaster-prone area*).

Menurut Nurjanah dkk. (2012), kapasitas yang kuat untuk menghadapi ancaman bencana berkaitan dengan program / kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Tujuan utamanya adalah masyarakat yang mampu mengantisipasi bencana, mampu menangani keadaan darurat dan mampu pulih dari bencana. Oleh karena itu, program / kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bencana, manajemen bencana melalui penerapan teknologi dan pemetaan spasial;

2. Sistem peringatan dini dari berbagai jenis bencana;
3. Sosialisasi bencana melalui media massa;
4. Pelatihan manajemen bencana;
5. Pemberian dukungan teknis dan non-teknis, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, pembangunan kapasitas masyarakat pada pengenalan ancaman dan kerentanan di wilayahnya

Pendidikan dan pelatihan tentang pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, termasuk banjir, harus diadakan. Muatan materinya disesuaikan dengan keadaan unik dari potensi situasi kebencanaan dan berdasarkan pada pengalaman bencana yang sebelumnya. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya.

Manajemen bencana tidak hanya menuntut partisipasi individu dalam komunitas yang rentan, tetapi juga keterlibatan instansi pemerintah terkait, LSM, dan sektor swasta. Hal ini harus didukung dengan strategi manajemen yang efektif melalui perencanaan operasional, pendidikan dan pelatihan kelompok. Pengembangan sistem manajemen bencana dapat dimulai dari formulasi kebijakan di tingkat pemerintah demi kesiapsiagaan komunitas/ masyarakat.

Akhirnya, menurut UN-Habitat (2001), pengambilan keputusan hendaknya merupakan kombinasi dari pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang memungkinkan keterlibatan semua *stakeholder* atas dasar kesetaraan. Para *stakeholder* terdiri dari pemerintah (yang bertanggung jawab), lembaga akademis, sektor swasta, LSM dan warga masyarakat. Keterlibatan pengetahuan *stakeholder* dari perspektif yang berbeda bersama-sama memungkinkan pemahaman risiko banjir yang *koheren*. Anggota komunitas yang terkena dampak banjir memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan untuk mempromosikan integrasi tuntutan mereka dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan *stakeholder* memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan implementasi tindakan pengelolaan banjir yang efektif dan berkelanjutan karena sebagian besar

stakeholder mendukung mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen bencana banjir yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multi-pihak dan partisipasi komunitas secara simultan. Partisipasi setiap komponen komunitas dalam menjalankan manajemen bencana merupakan kunci keberhasilan. Kiranya semakin besar keterlibatan mereka akan dapat meningkatkan kapasitas dalam meminimalkan risiko banjir.

Manajemen bencana banjir harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan sinergis dari berbagai pihak dalam upaya untuk mengatasi bencana tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan nanti tidak lagi dilakukan secara parsial oleh masing-masing pihak, tetapi semua elemen dapat terlibat untuk bekerja sama secara bahu-membahu. Oleh karena itu, memperkuat *sense of crisis*, kepedulian, komitmen, peran dan tanggung jawab kolektif dan kontinuitas kerjasama / kolaborasi dalam konteks jaringan *governance* diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan bencana banjir yang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan, serta Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan menerima kami dan memberikan akses data-informasi yang berkaitan dengan hal kebencanaan setempat, khususnya banjir, dan upaya penanggulangannya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kooiman, Jan. 1993. "Modern governance." *Social-political Governance*. London: Sage.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pedroso, Leonora. 1999. *Eastern Regional*

Organization for Public Administration: From Government to Governance. World Conference on Governance.

Tun Lin Moe & Pathranarakul P. 2006. "An integrated approach to natural disaster management." *Disaster Prevention and Management Journal*. Vol. 15 No. 3. hal. 396-413.

UN-Habitat. 2001. *Tools to Support Participatory Urban Decision Making, Nairobi: United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)*.

Wijaya, Andy F. 2007. "Problem Antisipasi Bencana: dalam Perspektif *Good Governance* dan Manajemen Pelayanan Publik." Makalah Seminar Nasional Potensi Migas dan Antisipasi Bencana di Jawa Timur. Malang: Universitas Brawijaya.